

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 3 November 2020



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Timesindonesia.co.id	Selasa, 3 November 2020	Kementerian PUPR RI: Akhir Oktober 2020, Realisasi Program Sejuta Rumah Capai 601.637 Unit	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Salah satunya melalui Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden RI Jokowi sejak 29 April 2015. Pada TA 2020, hingga 31 Oktober 2020 Program Sejuta Rumah ini telah mencapai 601.637 unit. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/307342/kementerian-pupr-ri-akhir-oktober-2020-realisasi-program-sejuta-rumah-capai-601637-unit https://www.antaranews.com/berita/1817792/pandemi-kementerian-pupr-program-sejuta-rumah-capai-601637-unit
2	Antaranews.com	Senin, 2 November 2020	Penyaluran dana pembiayaan perumahan tembus 94,5 persen	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mencatat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 94,54 persen. https://www.antaranews.com/berita/1816896/penyaluran-dana-pembiayaan-perumahan-tembus-945-persen
3	Beritasatu.com	Selasa, 3 November 2020	Peringatan HKD 2020, Infrastruktur PUPR untuk Mendukung Terwujudnya Kota Layak Huni	Sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan kawasan perkotaan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya, Selasa (3/11/2020), mengatakan, peringatan Hari Kota Dunia (HKD) yang diperingati setiap tanggal 31 Oktober menjadi momen penting untuk merefleksi program-program penataan kota dalam rangka mendukung terwujudnya kota layak huni dan berkelanjutan. https://www.beritasatu.com/edihardum/ekonomi/694023/peringatan-hkd-2020-infrastruktur-pupr-untuk-mendukung-terwujudnya-kota-layak-huni
4	Kompas.com	Senin, 2 November 2020	Tiga Hari, Kementerian PUPR Gelar Wawancara Peserta LPJK 2021-2024	Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan uji wawancara calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2021-2024. Proses seleksi uji wawancara tersebut dilakukan selama tiga hari yakni, Senin (2/11/2020) hingga Rabu (4/11/2020). https://properti.kompas.com/read/2020/11/02/110000821/tiga-hari-kementerian-pupr-gelar-wawancara-peserta-lpjk-2021-2024
5	Inilahkoran.com	Senin, 2 November 2020	Jalan Puncak II Dibangun Kementerian PUPR pada 2022	Pada 2021 nanti, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membuat kajian detail engineering design (DED) lalu memulai dilakukan pembangunan pada 2022 mendatang. https://www.inilahkoran.com/berita/65003/jalan-puncak-ii-dibangun-kementerian-pupr-pada-2022
6	Tempo, Halaman Ekonomi Bisnis 2	Selasa, 3 November 2020	Menakar Beban Taman Komodo	Pemerintah akan membangun kawasan pariwisata terintegrasi yang berpusat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Judul	Menakar Beban Taman Komodo	Tanggal	Selasa, 3 November 2020
Media	Tempo, Halaman Ekonomi Bisnis 2		
Resume	Pemerintah akan membangun kawasan pariwisata terintegrasi yang berpusat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.		

EKONOMI DAN BISNIS

Menakar Beban Taman Komodo

Konsep super-premium akan merusak bisnis pariwisata masyarakat lokal.

EDISI, 3 NOVEMBER 2020

f t i s +

REPORTER: TEMPO



Wisata kapal baji di sekitar Pulau Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat. Tempo/Syar Kurni

JAKARTA – Pemerintah akan membangun kawasan pariwisata terintegrasi yang berpusat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain mengembangkan destinasi wisata baru, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Shana Fatina, mengklaim program ini dapat mendukung konservasi Taman Nasional Komodo. "Kita bisa mengurangi beban wisata di Taman Nasional Komodo," katanya kepada *Tempo*, kemarin.

Shana menyatakan kawasan perkotaan Labuan Bajo akan ditata untuk memberikan opsi destinasi selain Taman Nasional Komodo. Atraksi yang ditawarkan bukan hanya wisata alam, tapi juga wisata bahari serta budaya dan masyarakat. Dia mencontohkan rencana pembangunan penginapan di rumah masyarakat yang sekaligus untuk mengenalkan keseharian penduduk setempat.

Wisata Labuan Bajo juga akan terintegrasi dengan Flores, Alor, Lembata, serta Bima di Nusa Tenggara Barat atau disebut kawasan Floratama. Shana mencatat terdapat setidaknya 34 atraksi wisata yang bisa ditawarkan di kawasan Floratama. Beberapa di antaranya adalah Danau Kelimutu, Taman Laut di Teluk Maumere, dan Kampung Adat Kawa di Nagekeo.

"Atraksi wisatanya tidak kalah eksotis," ujarnya. Badan Otorita bersama kementerian dan lembaga terkait sedang menggarap rencana induk wisata terintegrasi di kawasan ini.

Sementara itu, di kawasan Taman Nasional Komodo, khususnya Pulau Padar dan Pulau Komodo, kunjungan wisata akan dibatasi maksimal 200 ribu orang per tahun. Pemerintah berencana menerapkan sistem keanggotaan berbayar untuk mengakses kedua pulau tersebut. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Wayan Darmawa, memperkirakan biayanya sebesar US\$ 1.000 per tahun. "Satu keanggotaan bisa digunakan empat orang," katanya.

Dengan konsep eksklusif, Wayan menyatakan, target pasar wisatawan di Taman Nasional Komodo tak lagi mengacu pada asal negara. Selama ini, kunjungan ke taman nasional masih didominasi wisatawan mancanegara. Hingga 2019, jumlah wisatawan asing mencapai 134 ribu orang, sementara wisatawan domestik 67 ribu orang.

Wisata Terintegrasi NTB-NTT

Pemerintah mengembangkan Labuan Bajo sebagai pusat wisata terintegrasi, dari Bima, Nusa Tenggara Barat, hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah titik wisata dipersiapkan untuk menerima pelancong. Berikut ini peta pengembangan wisata di tiga kabupaten yang bertetangga.

Kabupaten Bima

1. Pantai Lariti 2. Pulau Ular Wera

Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat

3. Loh Liang 6. Manta Point
4. Pantai Pink 7. Pulau Padar
5. Pulau Kalong 8. Loh Buaya

Kabupaten Manggarai Barat

9. Bandara Komodo
10. Gua Batu Cermin
11. Gua Rangko

Kabupaten Manggarai

12. Desa Wae Rebo
13. Lingko Lodok
14. Luang Bua

Jumlah Pengunjung Taman Nasional Komodo

Tahun	Turis Asing	Turis Domestik
2009	34.954	1.580
2010	41.706	2.965
2011	41.833	6.177
2012	41.972	8.010
2013	54.147	9.654
2014	67.089	13.537
2015	76.195	19.215
2016	78.614	29.094
2017	69.893	47.209
2018	121.409	55.421
2019	134.495	66.977

SUMBER: BADAN PELAKSANA OTORITAS LABUAN BAJU FLORES
VINDRY FLORENTIN

Untuk mendukung wisata super-premium di kedua pulau tersebut, pemerintah tengah menyiapkan fasilitas dengan kualitas yang sesuai. Wayan menuturkan pengelolaannya akan ditangani perusahaan pelat merah milik pemerintah NTT, yaitu PT Flobamor. "Pemerintah akan membantu membangun fasilitas dasarnya," kata dia.

Wayan memastikan fasilitas berkualitas juga akan disediakan pemerintah di kawasan wisata lainnya, lantaran Labuan Bajo dan sekitarnya akan diubah menjadi destinasi wisata premium berkelanjutan. Dia mencontohkan penataan fasilitas wisata di Loh Buaya, Pulau Rinca.

Di kawasan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun infrastruktur tambahan, seperti jalan gertak *elevated* seluas 3.055 meter persegi. Sarana lainnya yang dibangun adalah penginapan petugas *ranger*, peneliti, dan pemandu wisata seluas 1.510 meter persegi; pusat informasi 3.895 meter persegi, serta pos istirahat 318 meter persegi dan pos jaga 126 meter persegi. Kementerian Pekerjaan Umum juga bertugas menyiapkan sistem pengelolaan air minum, pengaman pantai, serta pembangunan dermaga.

Namun pengembangan kawasan wisata di Labuan Bajo, khususnya dengan menata ulang Taman Nasional Komodo, ini mendapat penolakan dari berbagai pihak. Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, mengatakan pembangunan di kawasan konservasi itu mengancam habitat komodo serta hewan endemik lainnya. Dia menilai penerapan konsep super-premium juga akan merusak pariwisata yang selama ini dibangun masyarakat lokal.

"Walhi juga mendapati adanya perubahan zonasi di Taman Nasional Komodo demi memberi karpet merah bagi investasi," katanya. Umbu mencontohkan perubahan zonasi di Pulau Padar pada 2012. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkonversi 303,9 hektare zona rimba menjadi zona pemanfaatan wisata darat. Seluas 275 hektare lahannya diperuntukkan sebagai ruang usaha.

JOHN SEO (KUPANG) | AVIT HIDAYAT | VINDRY FLORENTIN